



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	15
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 10 Februari 2020
Pukul	:	13.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Progres Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian serta lembaga terkait lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna memberikan perlindungan jaminan sosial dan perlindungan asuransi di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia, termasuk Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yang bekerja melalui BP2MI dan Pekerja Migran Indonesia Mandiri;2. Langkah Strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi perkembangan revolusi Industri 4.0 dan digitalisasi terhadap upaya perlindungan pekerja;3. Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program pelatihan vokasi bagi peningkatan kualitas SDM;4. Monitoring dan Evaluasi Investasi BPJS Ketenagakerjaan pada surat-surat berharga.
Ketua Rapat	:	Emanuel Melkiades Laka Lena/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 33 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Dirut BPJS Ketenagakerjaan : Agus Susanto

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dibuka pukul 13.25 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bantuan masker kepada Pekerja Migran Indonesia di negara-negara yang terdampak positif virus corona.
2. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BP2MI, Kementerian dan Lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan perlu terus melakukan terobosan guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada PMI termasuk pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi para pekerja di dalam maupun di luar negeri yang diarahkan pada bidang yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah / negara dan mempersiapkan perluasan program-program kepada keluarga peserta.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana pekerja yang diinvestasikan terutama pada surat berharga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang optimal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pekerja, untuk itu akan diagendakan rapat untuk membahas tata kelola investasi BPJS Ketenagakerjaan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan membuat langkah strategis dan terobosan dalam menghadapi perkembangan revolusi industry 4.0 dan era digitalisasi terhadap upaya perlindungan bagi pekerja.
6. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan publikasi atas capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan di media massa.

7. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan memberikan data –data sebagai berikut:
 - a. asset BPJS dan asset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dimiliki dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan secara transparan termasuk penyertaan pada instrument investasi.
 - b. data peserta PMI yang bekerja di Luar Negeri
 - c. roadmap pemberian beasiswa yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan
 - d. skema Pelatihan Vokasi Indonesia Bekerja termasuk kerjasama dengan perusahaan dalam menjawab kebutuhan SDM
 - e. program kerja tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan
 - f. data peserta dan pengelolaan dana peserta aktif dan tidak aktif di dalam negeri
8. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlindungan PMI baik di dalam dan luar negeri dan program pemberdayaan PMI dalam hal pengembangan desa kantong-kantong PMI, literasi keuangan dan pelatihan vokasi, bekerjasama dengan Anggota Komisi IX DPR RI di daerah pemilihannya masing-masing.
9. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini dan disampaikan paling lambat, hari Senin, tanggal 24 Februari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.55 WIB.

Jakarta, 10 Februari 2020

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331